

Hubungan antara Persepsi Risiko dan Kepercayaan Masyarakat Terdampak terhadap Otoritas dalam Upaya Mitigasi Dampak Kabut Asap Riau

Nurul Aiyuda¹, Koentjoro²

^{1,2} Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada

Abstract. Mitigation is the effort to reduce the impact of haze. This study was aimed to examine the relationship between risk perception and trust of authorities toward the mitigation effort of haze impact in Riau. Trust of authorities in this study included the government, military, police and medical authorities. For this aim, hypothesis have been tested using data collected from a sample of 256 people affected by haze which taken by using purposive sampling. Data were collected using three scales; the mitigation scale, the risk perception scale and the trust scale. This study found that risk perception and trust of authorities were simultaneously related to haze impact mitigation with R square 0,108. Risk perception may affect the mitigation effort. In this research can be found that the citizen mitigation tends to be low, this is caused by low public perception in rating the risk of haze impact in Riau. This study also found that the military and medical authorities correlated with haze mitigation effort; however the trust in the government and police authorities had no relationship with haze mitigation effort in Riau.

Keywords: haze, mitigation, risk perception, trust of authority

Abstrak. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi dampak kabut asap. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dalam upaya mitigasi bencana dampak asap di Riau lewat persepsi risiko dan kepercayaan masyarakat terdampak. Kepercayaan otoritas dalam penelitian ini meliputi otoritas pemerintah, militer, polisi dan medis. Sampel dalam penelitian ini adalah 256 individu yang terkena dampak kabut asap diambil menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga skala, skala mitigasi, skala persepsi risiko dan skala kepercayaan. Studi ini menemukan bahwa persepsi risiko dan kepercayaan otoritas secara bersamaan terkait dengan mitigasi dampak asap dengan R square 0,108. Secara terpisah persepsi risiko dapat memengaruhi upaya mitigasi. Dalam penelitian ini, mitigasi masyarakat cenderung rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya persepsi masyarakat dalam menilai risiko dampak kabut asap Riau. Studi ini juga menemukan bahwa TNI dan medis berkorelasi dengan usaha mitigasi kabut; Namun kepercayaan pemerintah dan aparat kepolisian tidak memiliki hubungan dengan upaya mitigasi kabut di Riau.

Kata kunci : mitigasi, kabut asap, kepercayaan otoritas, persepsi risiko

¹ Korespondensi melalui artikel ini dapat disampaikan melalui: nurul.aiyuda@mail.ugm.ac.id

² Atau melalui: koentjoro@ugm.ac.id

Potensi kebakaran hutan di Indonesia terus meningkat, bersamaan dengan risiko yang ditimbulkan. World Wildlife Fund Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 1997 Riau merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam kasus kebakaran hutan, dari 267 titik api 114 di antaranya berasal dari Riau (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2015). Tercatat juga bahwa 20 juta orang Indonesia mengalami berbagai gangguan paru dan sistem pernapasan akibat kabut asap sebagai dampak kebakaran hutan (Faisal, Yunus, & Harahap, 2012). Kebakaran hutan menyebabkan dampak langsung seperti degradasi vegetasi, kerugian hayati, harta benda bahkan nyawa, sedang dampak tidak langsung bisa menimbulkan asap, emisi karbon pada atmosfer dan kesehatan manusia (Herawati & Santoso, 2011).

Mitigasi perlu dilakukan dalam rangka mengurangi risiko tersebut. Mitigasi secara sederhana diartikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang disadari (Renn, 2008). Dengan kata lain, mitigasi mengacu pada tindakan untuk mengubah proses yang berkontribusi dalam menciptakan masalah (Meldrum *et al.*, 2015). Pengalaman masyarakat Riau dalam menghadapi kabut asap diprediksi dapat meningkatkan upaya mitigasi individu dalam kondisi bencana. Hal sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pengalaman langsung akan risiko bencana menyebabkan kepedulian dan upaya mitigasi untuk mengatasi bencana (Haden, Niles, Lubell, Perlman, & Jackson, 2012; McDonald, Chai, & Newell, 2015; Spence, Poortinga, Butler, & Pidgeon, 2011). Di sisi lain, beberapa penelitian justru menyebutkan bahwa pengalaman langsung terhadap kebakaran hutan tidak memberikan kontribusi pada upaya mitigasi (Ho, Shaw, Lin, & Chiu, 2008; Martin, Martin, & Kent, 2009). Di sisi lain,

individu kurang melakukan mitigasi, bila merasa tidak terancam akan risiko bencana (Renn, 2004). Dalam kasus kabut asap di Riau, kondisi kabut asap bisa diprediksi hampir setiap tahun dan akan hilang dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat membuat individu merasa tidak terancam. Bukan itu saja, karena mereka terbiasa dengan kondisi yang berulang seperti ini maka korban cenderung mengabaikan risiko bencana dan kurang melakukan upaya mitigasi. Mereka melakukan mitigasi sebatas yang mengancam dirinya.

Mitigasi bisa diupayakan dengan mengubah persepsi risiko masyarakat terhadap dampak kabut asap. Melalui persepsi risiko beberapa hal bisa diungkap terkait penilaian masyarakat terhadap bencana. Persepsi risiko dapat menjadi dasar preferensi masyarakat dengan mengungkap nilai, keprihatinan masyarakat dan gaya hidup yang kemudian bisa dijadikan pedoman untuk merancang mitigasinya. Dengan kata lain bagaimana individu mempersepsi risiko akan membantu individu untuk melakukan mitigasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa persepsi risiko berperan dalam mengupayakan langkah mitigasi (Brenkert-Smith, Champ, & Flores, 2012; Lin & Shaw, 2008; Truelove & Parks, 2012). Pada kondisi bencana, dalam mengupayakan mitigasi masyarakat cenderung mengalami ketidakberdayaan, hal ini muncul karena bencana yang berada diluar kontrol individu. Dalam kondisi tidak berdaya, individu cenderung bergantung pada bantuan pemerintah dan relawan (O'Neill, 2013). Ketergantungan individu akan memunculkan kepercayaan dengan keyakinan bahwa ada otoritas di luar dirinya yang akan memberikan perlindungan. Dalam hal ini kepercayaan yang dianggap memengaruhi mitigasi adalah kepercayaan terhadap pemerintah, ahli, maupun media (Lin & Shaw, 2008).

Selain mitigasi, kepercayaan memiliki hubungan dengan bagaimana mempersepsi risiko. Bencana berinteraksi dengan kondisi sosial. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa penilaian masyarakat terhadap risiko tergantung bagaimana orang-orang sekitar menilai ataupun memperdebatkan risiko (Martin *et al.*, 2009; Renn, 2008). Penilaian risiko bergantung pada kepercayaan sosial, dalam hal ini media, para ahli, ataupun otoritas yang berwenang. Penilaian akan cenderung heuristik (Renn & Rohrman, 2000.), di mana otoritas yang dipercaya akan menjadi sumber kebenaran dalam menilai risiko. Pada pola pemikiran heuristik individu mempersepsi risiko sesuai dengan otoritas yang dianggap memiliki kompetensi dan integritas dalam menilai atau menangani risiko.

Pada kondisi ini, pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam penanggulangan bencana kabut asap Riau, pemberian izin maupun penegak hukum dianggap berperan penting dalam mengatasi kabut asap. Dengan demikian masyarakat merasa bisa berkerja sama melakukan upaya mitigasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Wachinger, Renn, Begg, dan Kuhlicke (2013) bahwa tingkat kepercayaan terhadap ahli memiliki dampak besar dalam mempersepsi risiko. Berdasar persepsi risiko inilah kemudian akan mengarahkan individu pada kesiapan mitigasi. Individu mempersepsi risiko kemudian menilai apakah risiko bisa diterima atau tidak, setelah itu, individu akan melakukan upaya mitigasi (Bronfman, Jimenez, Arevalo, & Cifuentes, 2012; Bronfman, Jimenez, Arevalo, & Cifuentes, 2015). Berangkat dari apa yang dijelaskan di atas dapat diasumsikan bahwa persepsi risiko dan kepercayaan otoritas akan mengarahkan individu untuk melakukan upaya mitigasi penanganan kabut asap di Riau. Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara

persepsi risiko dan kepercayaan otoritas terhadap upaya mitigasi dampak kabut asap di Riau?

Metode

Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah mengalami paparan asap setidaknya selama lima tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai 2016 dan tinggal di daerah Pekanbaru dalam periode tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan secara *online* melalui *google form*, didistribusikan menggunakan kelompok media sosial. Subjek dalam penelitian berjumlah 256.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian menggunakan tiga skala. Pertama skala mitigasi kabut asap didasarkan pada jenis mitigasi polusi udara dari Skov, Cordtz, Jensen, Saugman, Schmidt & Theilade (1991) yang juga di rujuk oleh Wei, Zhu, Marinova, dan Wang (2016) dalam dua bentuk mitigasi yaitu mitigasi untuk mengurangi kabut asap serta mitigasi untuk mengurangi dampak paparan kabut asap bagi individu. Skala dinilai dengan menggunakan *rating scale* dari tidak pernah (1) sampai pernah (7). Ada 14 aitem skala dengan reliabilitas *Cronbach α* bernilai 0,811. Skala persepsi risiko kabut asap didasarkan pada dimensi persepsi risiko dari Paul Slovic, yaitu dimensi *Unknown Risk* dan *Dread Risk* (Slovic, 1993b; Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1980, 1986, 2000; Slovic, Flynn, Mertz, Poumadere, & Mays, 2000). Skala dinilai dengan ketentuan sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (7). Sedang pada skala persepsi risiko reliabilitas *Cronbach α* bernilai 0,835 dengan 14 aitem skala. Sementara untuk skala kepercayaan otoritas didasarkan pada dimensi kepercayaan berbasis kompetensi dan

kepercayaan berbasis integritas dari risiko, nilai *mean* (rerata) empirik = 75, 26

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variabel	Hipotetik					Empirik				
	Range	Min	Max	\bar{x}	SD	Range	Min	Max	\bar{x}	SD
Mitigasi	114	19	133	76	19	67	23	90	51,56	14,180
Persepsi risiko	114	19	133	76	19	58	40	98	75,35	9,962
Kepercayaan otoritas Pemerintah	132	22	154	88	22	132	22	154	97,05	29,613
Kepercayaan otoritas TNI	132	22	154	88	22	122	32	154	113,41	28,694
Kepercayaan otoritas Polri	132	22	154	88	22	132	22	154	96,48	32,610
Kepercayaan otoritas Medis	132	22	154	88	22	104	50	154	122,71	24,090

Tabel 2.
Model hubungan persepsi risiko, kepercayaan otoritas pemerintah, TNI, Polri dan medis terhadap mitigasi

Model	R square	sig
Persepsi risiko, Kepercayaan otoritas pemerintah, TNI, Polri dan medis terhadap mitigasi	0,108	0,000**

Model	Beta	sig
Persepsi risiko terhadap mitigasi	0,263	0,000**
Kepercayaan otoritas pemerintah terhadap mitigasi	0,092	0,144
Kepercayaan otoritas TNI terhadap mitigasi	0,139	0,026*
Kepercayaan otoritas Polri terhadap mitigasi	0,050	0,430
Kepercayaan otoritas medis terhadap mitigasi	0,233	0,000**

Description : **p<0,01 p<0,05

Bronfman, Cisternas, López-Vázquez, dan Cifuentes (2016), Ditambah dengan dimensi kepercayaan berbasis kebajikan dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) serta Colquitt, Scott, dan LePine (2007). Skala kepercayaan otoritas pemerintah memiliki reliabilitas 0,963, kemudian 0,982 pada skala kepercayaan otoritas TNI, 0,986 pada skala kepercayaan otoritas Polri dan 0,966 pada skala kepercayaan otoritas Medis.

Hasil

Dari tabel 1 diketahui, *mean* (rerata) mitigasi hipotetik adalah 76, lebih besar dari *mean* (rerata) empirik yaitu 51,57 dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek penelitian memiliki mitigasi yang rendah dibanding dengan yang seharusnya. Sementara pada persepsi

mendekati *mean* (rerata) empirik yaitu 76. Namun demikian, persepsi risiko pada penelitian ini masih dibawah dari rerata seharusnya. Sedang pada kepercayaan otoritas, *mean* (rerata) hipotetik = 88 memiliki nilai lebih rendah di banding *mean* (rerata) empirik 96, 87 pada otoritas pemerintah, 113,36 pada otoritas TNI, kemudian 96, 40 pada otoritas Polri dan 122, 65 pada otoritas Medis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepercayaan otoritas pada penelitian ini tinggi, dan secara berurutan dapat dikatakan bahwa kepercayaan otoritas medis berada pada tingkat pertama, kemudian kepercayaan otoritas tni, berikutnya pemerintah, sedang otoritas yang memiliki kepercayaan terendah pada penelitian ini adalah Polri.

Model hubungan persepsi risiko, kepercayaan otoritas pemerintah, TNI, Polri dan medis terhadap mitigasi

mitigasi dampak kabut asap. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko dapat memengaruhi upaya mitigasi ($p: 0,000$)

Tabel 3.

Model hubungan persepsi risiko dan kepercayaan otoritas

Model	R	sig
Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas pemerintah	0,139	0,026*
Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas TNI	0,298	0,000**
Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas Polri	0,108	0,085
Persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas medis	0,251	0,000**

Melalui tabel 2 diketahui ada hubungan antara persepsi risiko dan kepercayaan otoritas pemerintah, tni, polri serta medis terhadap mitigasi memiliki nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,01$) dengan R square 0,108. Persepsi risiko dan kepercayaan otoritas secara simultan memengaruhi mitigasi sebesar 10,8%. Korelasi antara persepsi risiko terhadap mitigasi memiliki taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,01$) dengan nilai beta 0,263 sehingga persepsi risiko dapat dikatakan memiliki hubungan terhadap mitigasi. Semakin tinggi persepsi risiko pada dampak kabut asap, semakin baik pula usaha mitigasi dampak kabut asap yang dilakukan.

Hubungan antara kepercayaan pemerintah terhadap mitigasi dengan taraf signifikansi 0,144 ($p > 0,05$) dan nilai beta sebesar 0,092. Dengan kata lain, secara terpisah, kepercayaan pada tokoh otoritas pemerintah tidak berkontribusi terhadap mitigasi. Hal ini sama dengan hubungan antara kepercayaan otoritas polri terhadap mitigasi, nilai signifikansi adalah 0,430 ($p > 0,05$) dengan nilai beta 0,050, sehingga kepercayaan pada otoritas polri secara terpisah tidak memberikan kontribusi terhadap Mitigasi. Sementara itu, kepercayaan otoritas tni terhadap mitigasi memiliki nilai signifikansi 0,026 ($p < 0,05$) dan nilai beta 0,139. Kepercayaan otoritas medis terhadap mitigasi memiliki nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,01$) dengan nilai beta 0,233. Dalam artian, baik itu kepercayaan otoritas tni dan medis dapat berkontribusi dalam mengupayakan

begitupun kepercayaan otoritas tni ($p 0,026$) dan medis ($p 0,000$), namun, kepercayaan pemerintah dan polri tidak ada kaitannya dengan upaya mitigasi asap Riau ($p > 0,05$).

Tabel 3 menunjukkan bahwa korelasi antara persepsi risiko dan kepercayaan otoritas pemerintah memiliki nilai signifikansi 0,026 ($p < 0,01$) dengan nilai r square 0,139. Sedangkan persepsi risiko terhadap kepercayaan tni memiliki nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,01$) dan nilai beta 0,298. Untuk model persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas polri dapat dikatakan bahwa tidak berkorelasi terhadap mitigasi dengan nilai signifikansi 0,085 ($p < 0,05$) dan nilai beta 0,108. Sementara, persepsi risiko terhadap kepercayaan otoritas medis dapat dikatakan berkorelasi dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,01$) dan nilai R Square sebesar 0,251.

Diskusi

Seperti hipotesis penelitian ini, dapat dilihat bahwa persepsi risiko dan kepercayaan pada otoritas pemerintah, TNI, polri dan medis secara simultan memengaruhi upaya mitigasi dampak kabut asap. Temuan ini sejalan dengan Bronfman *et al.* (2016) yang menyebutkan bahwa persepsi risiko dan kepercayaan terhadap otoritas dapat berkontribusi pada upaya kesiapsiagaan individu dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan akan membantu individu untuk menerima

risiko bencana, sehingga melakukan upaya mitigasi (Wachinger *et al.*, 2013).). Sementara itu, persepsi risiko memiliki korelasi positif terhadap mitigasi, dengan kata lain, semakin tinggi persepsi risiko, semakin tinggi pula mitigasi dampak kabut asap di Riau. Hal ini sejalan dengan pendapat Brenkert-Smith *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa dengan merasakan risiko tinggi, individu akan melakukan upaya mitigasi yang tinggi. Temuan serupa juga dinyatakan oleh Lin dan Shaw (2008) yang menyebutkan bahwa persepsi risiko dapat mengacu pada upaya mitigasi individu.

Hubungan positif antara kepercayaan otoritas dan mitigasi temuan penelitian ini, juga sejalan dengan hasil penelitian Bronfman *et al.* (2016) dan Lin & Shaw (2008) yang menjelaskan bahwa individu sebagai korban dalam situasi bencana lebih sulit percaya dibandingkan masyarakat umum terhadap pemerintah dalam mengupayakan mitigasi. Ketidakpercayaan dalam situasi bencana cenderung membuat individu mengabaikan informasi dari otoritas, ini kemudian bisa dilihat dari tidak adanya hubungan antara kepercayaan pemerintah dan Polri terhadap mitigasi. Kondisi saat ini menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah dan Polri berada di tingkat terendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Agung (2012) yang menyebutkan instansi seperti Polri dan aktor politik memiliki tingkat kepercayaan terendah di Indonesia.

Dalam hal persepsi risiko maupun kepercayaan otoritas berhubungan dengan mitigasi dapat dijelaskan melalui teori proses informasi heuristik dan sistematis dari Chaiken dan Ledgerwood (2012). Sebelum sampai pada tahapan mitigasi melalui proses berpikir heuristik ataupun sistematis, dalam memahami proses penilaian risiko, *drive* psikologi awal yang memengaruhi individu adalah perhatian

dan seleksi informasi (Renn & Rohrman, 2000).

Dalam proses perhatian dan seleksi informasi ini, media dianggap berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait risiko maupun pengaruh kepercayaan terhadap otoritas (Kasperson *et al.*, 2000; Slovic, 2000b). Individu juga bisa mendapatkan informasi risiko melalui tetangga atau keluarga, semakin banyak informasi yang dimiliki individu untuk menilai risiko memungkinkan individu untuk menilai risiko dengan baik sehingga merujuk pada kesadaran untuk melakukan mitigasi (Dickinson, Brenkert-Smith, & Flores, 2015). Namun, menurut Renn dan Rohrman (2000), meskipun individu dapat menerima banyak informasi, umumnya mereka tidak memproses semua informasi tersebut melainkan sebagian kecil saja, hal ini dilakukan untuk menghemat waktu pengolahan informasi. Individu akan cenderung membuat penilaian secara singkat berdasarkan informasi atau pesan yang menonjol terkait persepsi risiko maupun manajemen risiko yang dilakukan oleh otoritas. Sehingga, dalam prosesnya individu akan cenderung berpikir heuristik dibanding sistematis dalam menilai risiko.

Kecendrungan berpikir heuristik akan membuat individu mempersepsi risiko bergantung pada informasi yang tersedia hanya berdasarkan *common sense* (Renn, 2008). Dengan demikian kemungkinan untuk upaya mitigasi yang dilakukan akan rendah bisa terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Martin, Bender, dan Raish (2007) yang menyebutkan bahwa pengetahuan subjektif yang rendah (*precontemplative*) atau tinggi (*contemplative*) pada korban kebakaran akan memengaruhi bagaimana individu mempersepsi risiko sebelum kemudian melakukan mitigasi. Dimana pengetahuan tinggi dapat memengaruhi bagaimana individu mempersepsi tingkat keparahan

risiko sehingga mengupayakan mitigasi. Adanya pengetahuan yang terkontemplasi ini menunjukkan bahwa proses pengolahan informasi yang digunakan bukan lagi proses heuristik intuitif namun memiliki unsur kehati-hatian dan proses pemikiran yang mendalam yang merupakan ciri dari berpikir sistematis.

Namun demikian rendahnya mitigasi, tidak serta merta dapat disebutkan sebagai bentuk ketidaktahuan masyarakat akan risiko (Bickerstaff, 2004). Persepsi risiko terkadang berinteraksi dengan aspek sosial seperti kepercayaan (Bickerstaff, 2004; Renn, 2008). Seperti dinyatakan Slovic (2000c) bahwa dalam menentukan persepsi risiko dan penerimaan risiko, sangat bergantung pada bagaimana kondisi sosio-politik dalam membentuk persepsi masyarakat. Dalam proses ini, informasi yang diterima masyarakat akan tergantung pada komunikasi risiko. Namun, dengan mempercayai kemampuan manajemen risiko untuk mengatasi masalah risiko, kekhawatiran akan bencana skala yang lebih luas mungkin tidak akan muncul (Slovic, 1993b).

Keterlibatan otoritas dalam bencana akan membuat individu berpikir lebih sistematis dalam menilai risiko, yang kemudian melaksanakan upaya mitigasi. Namun, dalam kondisi lain individu berpikir secara heuristik, informasi yang diberikan oleh otoritas yang dipercaya akan cenderung diterima seketika tanpa pemikiran yang lebih dalam, hal ini mungkin terjadi karena pemikiran otoritas dianggap sebagai pakar, populer atau karena pendapatnya yang sering didengar, sehingga kemudian otoritas menjadi pedoman dalam melakukan penilaian terhadap risiko. Chaiken dan Ledgerwood (2012) menjelaskan perihal pengolahan informasi heuristik-sistematis. Ada tiga motivasi dasar yang membuat individu berpikir secara heuristik atau sistematis, yaitu *accuracy motivation*, *defense motivation*

dan *impression motivation*. *Impression motivation*, individu cenderung termotivasi untuk membuat keputusan berdasarkan keinginan mereka untuk berafiliasi atau mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. *Defense motivation*, individu akan menerima pendapat yang sama dengannya dan menolak pendapat bertentangan, yang melibatkan ego dan komitmen pribadi, dengan kata lain penilaian akan disesuaikan dengan nilai dan atribusi pribadi. Sementara itu *accuracy motivation* merupakan motivasi penilaian yang didasarkan pada akurasi yang tidak memihak dan terbuka, dimana pada motivasi dan proses berpikirnya lemah akan menyebabkan individu memilih untuk berpikir secara heuristik dibanding sistematis.

Pada penelitian ini persepsi risiko memengaruhi kepercayaan otoritas pemerintah, TNI dan medis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bickerstaff (2004) bahwa persepsi risiko berdasarkan pada bagaimana individu percaya pada otoritas yang terlibat dalam risiko. Hal sama tidak ditemukan pada otoritas polri. Persepsi risiko justru tidak memengaruhi kepercayaan otoritas Polri. Ini mungkin terjadi dikarenakan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap otoritas Polri. Dalam kondisi kepercayaan otoritas terhadap mitigasi, pada TNI dan medis motivasi yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko sebelum melakukan mitigasi, individu akan cenderung heuristik melibatkan *accuracy motivation* dikarenakan kepercayaan terhadap kemampuan manajemen risiko yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Sementara untuk Polri, motivasi yang digunakan cenderung *defense motivation*, ini terjadi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terdampak pada penanganan kabut asap yang dilakukan oleh polri. Pada kondisi ketidakpercayaan cenderung lebih melibatkan ego sehingga memilih untuk menentang pernyataan

ataupun sikap polri dalam manajemen risiko, karena dinilai tidak sesuai dengan atribusi atau nilai pribadi, ini menjadi gambaran *defense motivation* yang dilakukan individu untuk menilai risiko pada kepercayaan otoritas polri.

Penelitian ini menemukan kepercayaan otoritas TNI dan medis memiliki hubungan positif dengan upaya mitigasi dampak kabut asap. Semakin tinggi kepercayaan terhadap penanganan kabut asap yang dilakukan oleh otoritas TNI maupun medis maka akan semakin baik pula upaya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat terdampak kabut asap. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan dalam penelitian Bronfman *et al.* (2016) bahwa ada hubungan antara ahli seperti medis dan TNI terhadap upaya mitigasi bencana. Bahkan senada dengan penelitian. Bronfman *et al.* (2016) menjelaskan bahwa kepercayaan otoritas medis berada pada tingkat kepercayaan tertinggi dalam kondisi bencana sementara otoritas medis pada tingkat kedua.

Sementara itu, kepercayaan otoritas pemerintah dan polri tidak memiliki hubungan dengan mitigasi. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan polri dalam mengatasi dampak kabut asap, mengingat dari skor rerata yang ada Polri dan pemerintah memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah dibanding kepercayaan masyarakat akan penanganan kabut asap yang dilakukan oleh medis dan TNI. Hal ini didukung oleh Slovic (1993a; 2000a) yang menyebutkan dalam mengembangkan penanganan manajemen risiko, rusaknya kepercayaan akibat perubahan sosial akan berdampak pada bagaimana penerimaan akan pendekatan manajemen risiko di masa depan. Bickerstaff (2004) menjelaskan bahwa persepsi risiko sering kali berinteraksi dengan isu-isu sosial, di

antaranya ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam bencana. Ketidakpercayaan pada instansi muncul karena beberapa hal, meliputi lemahnya integritas, *image* negatif, situasi yang dianggap penuh intrik, ataupun kurangnya kompetensi institusi dengan tidak menjalankan tugas dengan baik (Agung, Masyhuri, & Hidayat, 2013). Sebagai tambahan, ketidakpercayaan pada lembaga muncul akibat ketidaksesuaian antara individu dan lembaga dalam hal nilai-nilai sosial. Hal ini meliputi bagaimana lembaga dianggap melanggar aturan, memanipulasi aturan, ataupun mengingkari kontrak. Kedua lembaga dianggap menodai kehormatan dengan tidak bertanggung jawab pada tugas, ingkar janji, berbohong, dan terakhir lembaga tidak dipercayai karena menyalahgunakan wewenang yang dimiliki (Faturochman, 2000).

Slovic (1993a) menyebutkan dalam situasi bencana atau risiko ada beberapa hal yang dapat merusak kepercayaan. Adanya laporan telah terjadi masalah keamanan atau bahaya, penanganan bahaya yang tidak berlangsung tepat waktu ataupun terlambat, adanya bencana yang sama daerah lain yang tidak teratasi, serta laporan tentang kesehatan di wilayah bencana yang mulai menurun dibanding dengan wilayah sekitarnya. Kemudian Slovic (2000a) menambahkan pengalaman buruk dalam mengatasi bencana juga dapat merusak kepercayaan, namun pengalaman penanganan palsu yang dilakukan otoritas berada pada kategori tertinggi dalam merusak kepercayaan terkait penanggulangan bencana. Hal ini juga diungkapkan oleh Bronfman *et al.* (2016) yang menyebutkan bahwa pemerintah, baik itu pusat maupun daerah cenderung mendapatkan kepercayaan yang rendah dari masyarakat dalam penanganan bencana, hal ini dikarenakan pengalaman negatif yang terjadi pada penanganan bencana sebelumnya.

Otoritas tidak tinggal berdekatan dengan korban menjadi salah satu alasan yang menyebabkan asumsi negatif dan cenderung merujuk pada ketidakpercayaan dalam situasi bencana (Slovic, 2000a). Pemerintah dan Polri dianggap tidak turun langsung dalam penanganan bencana dibanding dengan TNI dan medis. TNI dianggap sebagai otoritas yang dapat membantu ketertiban secara umum dan sukarela dalam memberikan pelayanan, sementara medis dianggap sebagai ahli yang informasinya dapat diandalkan (Bronfman *et al.*, 2016). Di sisi lain, dalam penelitiannya Bronfman *et al.* (2016) menyebutkan bahwa Polri termasuk pada otoritas yang membantu ketertiban umum sehingga memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dalam situasi bencana. Namun demikian, penelitian ini justru ditemukan hal yang berkebalikan, mengingat kepercayaan terhadap Polri sendiri di Indonesia cukup rendah (Agung, 2012).

Kepercayaan otoritas yang rendah menyebabkan individu kurang mengupayakan mitigasi, mengingat tidak ada cukup informasi yang bisa diandalkan. Sama halnya dengan Dengan persepsi risiko yang rendah menandakan masyarakat kekurangan informasi membuat individu berpikir heuristik yang cenderung ringkas dan tidak menyaring kembali informasi yang ada, menyebabkan masyarakat tidak cukup baik dalam mengupayakan mitigasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Brenkert-Smith *et al.* (2012) bahwa pencarian informasi mendorong individu untuk melakukan upaya mitigasi. Di sisi lain, pengetahuan dapat menjadi sumber informasi dalam mengupayakan mitigasi. Ini sejalan dengan penelitian Martin *et al.* (2007) dan Martin *et al.* (2009) bahwa pengetahuan tinggi dapat mendorong individu dalam mengupayakan mitigasi. Bahkan program pendidikan disarankan untuk dilakukan sebagai upaya untuk

mengurangi risiko (Dickinson *et al.*, 2015). Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya melihat bagaimana hubungan antara pengetahuan dan mitigasi, atau bahkan bagaimana persepsi risiko memediasi hubungan ini, mengingat pengetahuan menjadi sumber informasi bagi individu dalam menilai risiko.

Kesimpulan

Persepsi risiko dan kepercayaan otoritas masyarakat terdampak memiliki korelasi positif signifikan dengan upaya mitigasi dampak kabut asap di Riau. Semakin positif persepsi risikonya, akan semakin positif pula upaya mitigasi yang dilakukan. Namun, dalam penelitian ini, mitigasi warga cenderung rendah. Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat yang rendah dalam menilai risiko dampak kabut asap Riau. Persepsi risiko berkorelasi dengan kepercayaan otoritas TNI, pemerintahan, dan medis namun tidak berkorelasi dengan otoritas Polri. Kepercayaan otoritas dalam upaya mitigasi, kepercayaan masyarakat pada otoritas TNI dan medis menyebabkan masyarakat bergantung bergantung pada kedua otoritas tersebut, dan kemudian melakukan upaya mitigasi. Sebaliknya, ketidakpercayaan warga negara terhadap kompetensi, integritas, dan kebajikan pemerintah dan Polri cenderung mengabaikan kedua institusi tersebut dalam melakukan upaya mitigasi.

Saran

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Riau terkait sosialisasi dampak kabut asap yang dilakukan selama ini, komunikasi tentang risiko perlu dilakukan tidak hanya di batas pertemuan sosialisasi tapi juga di luar waktu tersebut, sebelum atau sesudah terjadinya bencana. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lebih lanjut

sebagai agen untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan risiko dan solusinya. Selanjutnya, bagaimana pengetahuan bisa menjadi sumber informasi dalam memahami risiko bisa menjadi variabel yang cukup menarik untuk dipelajari di masa depan terkait hubungannya dengan mitigasi.

Kepustakaan

- Agung, I. M. (2012). General trust dan kepercayaan terhadap institusi publik pada mahasiswa. *Laporan Penelitian Center for Indigenous Psychology Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1–7.
- Agung, I. M., Masyhuri, & Hidayat. (2013). Dinamika ketidakpercayaan terhadap politisi: Suatu pendekatan psikologi indigenous. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(1), 25–30.
- Bickerstaff, K. (2004). Risk perception research: Socio-cultural perspectives on the public experience of air pollution. *Environment International*, 30(6), 827–840. doi: 10.1016/j.envint.2003.12.001
- Brenkert-Smith, H., Champ, P. A., & Flores, N. (2012). Trying not to get burned: Understanding homeowners' wildfire risk-mitigation behaviors. *Environmental Management*, 50(6), 1139–1151. doi: 10.1007/s00267-012-9949-8
- Bronfman, N. C., Jimenez, R. B., Arevalo, P. C., & Cifuentes, L. A. (2012). Understanding social acceptance of electricity generation sources. *Energy Policy*, 46, 246–252. doi:10.1016/j.enpol.2012.03.057
- Bronfman, N. C., Jimenez, R. B., Arevalo, P. C., & Cifuentes, L. A. (2015). Public acceptance of electricity generation sources: The role of trust in regulatory institutions. *Energy and Environment*, 26(3), 349–368. doi: 10.1260/0958-305X.26.3.349
- Bronfman, N. C., Cisternas, P. C., López-Vázquez, E., & Cifuentes, L. A. (2016). Trust and risk perception of natural hazards: Implications for risk preparedness in Chile. *Natural Hazards*, 81(1), 307–327. Retrieved from <http://doi.org/10.1007/s11069-015-2080-4>
- Chaiken, S., & Ledgerwood, A. (2012). A theory of heuristic and systematic information processing. In P. A. M. V. Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology-volume 2* (pp. 246–265). Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. *The Journal of Applied Psychology*, 92(4), 909–927. doi: 10.1037/0021-9010.92.4.909
- Dickinson, K., Brenkert-Smith, H., & Flores, N. (2015). Catching fire? Social interactions, beliefs, and wildfire risk mitigation behaviors. *Society and Natural Resources*, 28, 807–824. doi: 10.1080/08941920.2015.1037034
- Faisal, F., Yunus, F., & Harahap, F. (2012). Dampak asap kebakaran hutan pada pernapasan. *CDK-189*, 39(1), 31–35. Retrieved from http://www.kalbemed.com/Portals/6/10_189Dampak Asap Kebakaran Hutan pada Pernapasan.pdf
- Faturochman. (2000). Dinamika psikologis dan sosial kepercayaan. In Supratiknya, Faturochman, & S. Haryanto. (Eds.), *Tantangan psikologi menghadapi milenium baru* (pp. 1–18). Yogyakarta: Yayasan Pengembangan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Dina>

- mika Psikologis dan Sosial Kepercayaan.pdf
- Haden, V. R., Niles, M. T., Lubell, M., Perlman, J., & Jackson, L. E. (2012). Global and local concerns: What attitudes and beliefs motivate farmers to mitigate and adapt to climate change?. *Plos One*, 7(12). doi: 10.1371/journal.pone.0052882
- Herawati, H., & Santoso, H. (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy, and institutions in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 13(4), 227–233. doi: 10.1016/j.forpol.2011.02.006
- Ho, M., Shaw, D., Lin, S., & Chiu, Y. (2008). How do disaster characteristics influence risk perception?. *Risk Analysis*, 28(3), 635–643. doi: 10.1111/j.1539-6924.2008.01040.x
- Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., ... Ratick, S. (2000). The social amplification of risk: A conceptual framework. In R. E. Lofstedt (Ed.), *The perception of risk* (pp. 232–245). UK and USA: Taylor & Francis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (ke RI). (2015). Masalah kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. *InfoDATIN: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/article/view/16010500006/masalah-kesehatan-akibat-kabut-asap-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2015.html>
- Lin, S., & Shaw, Æ. D. (2008). Why are flood and landslide victims less willing to take mitigation measures than the public?. *Nat Hazards*, 44, 305–314. doi: 10.1007/s11069-007-9136-z
- Martin, I. M., Bender, H., & Raish, C. (2007). What motivates individuals to protect themselves from risks: The case of wildland fires. *Risk Analysis*, 27(4), 887–900. doi: 10.1111/j.1539-6924.2007.00930.x
- Martin, W. E., Martin, I. M., & Kent, B. (2009). The role of risk perceptions in the risk mitigation process: The case of wildfire in high risk communities. *Journal of Environmental Management*, 91(2), 489–498. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.09.007
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- McDonald, R. I., Chai, H. Y., & Newell, B. R. (2015). Personal experience and the “psychological distance” of climate change: An integrative review. *Journal of Environmental Psychology*, 44, 109–118. doi: 10.1016/j.jenvp.2015.10.003
- Meldrum, J. R., Champ, P. A., Brenkert-Smith, H., Warziniack, T., Barth, C. M., & Falk, L. C. (2015). Understanding gaps between the risk perceptions of Wildland-Urban Interface (WUI) residents and wildfire professionals. *Risk Analysis*, 35(9), 1746–doi: 10.1111/risa.12370
- O’Neill, M. (2013). “Learned helplessness” leaves people in major cities unprepared to cope in natural disaster. *Latine*, 1–6. Retrieved from <http://www.abc.net.au/news/2013-10-22/city-slickers-unable-to-cope-with-disasters/5038800>
- Renn, O. (2004). Perception of risks. *Toxicology Letter*, 149, 405–413. doi: 10.1016/j.toxlet.2003.12.051
- Renn, O. (2008). *Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world*. UK & USA: Earthscan.
- Renn, O., & Rohrman, B. (Eds.). (2000). *Cross-Cultural risk perception: A survey of empirical studies*. Stuttgart and Melbourne: Springer-Science+Business Media, B.V.

- Skov, T., Cordtz, T., Jensen, L. K., Saugman, P., Schmidt, K., & Theilade, P. (1991). Modifications of health behavior in response to air-pollution notifications in Copenhagen. *Social Science and Medicine*, 33(5), 621–626. doi: 10.1016/0277-9536(91)90220-7
- Slovic, P. (1993a). Perceived risk, trust, and democracy. *Risk Analysis*, 13(6).
- Slovic, P. (1993b). Perception of risk: Paradox and challenge. In L. N. Moses (Ed.), *Transportation of hazardous materials* (pp. 183–200). New York: Kluwer Academic Publishers.
- Slovic, P. (2000a). Perceived risk, trust, and democracy. In R. E. Lofstedt (Ed.), *The perception of risk* (pp. 216–326). UK and USA: Taylor & Francis.
- Slovic, P. (2000b). *The perception of risk*. UK and USA: Taylor & Francis.
- Slovic, P. (2000c). Trust, emotion, sex, politics and science: Surveying the risk-assessment battlefield. In R. E. Lofstedt (Ed.), *The perception of risk* (pp. 390–412). UK and USA: Taylor & Francis.
- Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1980). Facts and fears: Understanding perceived risk. In R. C. Schwing & J. W. A. Albers (Eds.), *Societal risk assessment* (pp. 212–214). New York: Springer-Science+Business Media.
- Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1986). The psychometric study of risk perception. In V. T. Covello, J. Menkes, & J. L. Mumpower (Eds.), *Risk evaluation and management*. New York and London: Plenum Press.
- Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (2000). Facts and fears: Understanding perceived risk. In R. E. Lofstedt (Ed.), *The perception of risk* (pp. 137–153). New York: Taylor & Francis.
- Slovic, P., Flynn, J., Mertz, C. K., Poumadere, M., & Mays, C. (2000). Nuclear power and the public: A comparative study of risk perception in France and the United States. In O. Renn & B. Rohrman (Eds.), *Cross-cultural risk perception, A survey of empirical studies* (pp. 55–102). Springer-Science+Business Media, B.V.
- Spence, A., Poortinga, W., Butler, C., & Pidgeon, N. F. (2011). Perceptions of climate change and willingness to save energy related to flood experience [Letter]. *Nature Climate Change*, 1(4), 46–49. Retrieved from <http://doi.org/10.1038/nclimate1059>
- Truelove, H. B., & Parks, C. (2012). Perceptions of behaviors that cause and mitigate global warming and intentions to perform these behaviors. *Journal of Environmental Psychology*, 32(3), 246–259. doi: 10.1016/j.jenvp.2012.04.002
- Wachinger, G., Renn, O., Begg, C., & Kuhlicke, C. (2013). The risk perception paradox-implications for governance and communication of natural hazards. *Risk Analysis*, 33(6), 1049–1065. doi: 10.1111/j.1539-6924.2012.01942.x
- Wei, J., Zhu, W., Marinova, D., & Wang, F. (2016). Household adoption of smog protective behavior: A comparison between two Chinese cities. *Journal of Risk Research*, 9877(March), 1–22. doi: 10.1080/13669877.2015.1121904